



**RENCANA KERJA TAHUN
2020
(RENJA)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2019



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagai dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41A Tahun 2009 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 41A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020, merupakan acuan bagi seluruh pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan program dan kegiatan, dan dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:

1. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang;
2. Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
3. Renja Dinas RSUD Kota Padang Panjang;
4. Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
5. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
6. Renja Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
7. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
8. Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
9. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
10. Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
11. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
12. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
13. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;
14. Renja Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang;
15. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
16. Renja Inspektorat Kota Padang Panjang;
17. Renja Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang;
18. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
19. Renja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
20. Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
21. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
22. Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
23. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang; dan
24. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020, terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

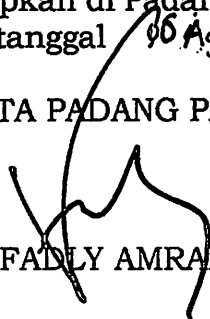
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 06 Agustus 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 06 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 45

Lampiran XX : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 06 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses Penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti, RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala SKPD menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan bepedoman kepada Rencana Strategis SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Renja ini antara lain adalah sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan umum, program dan kegiatan

pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

BAB II Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2018

Dalam Bab ini dipaparkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2018, Analisis Kinerja Pelayan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Pogram dan Kegiatan

Dalam Bab ini dipaparkan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program Kegiatan.

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan Capaian Renstra

Urusan OTODA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 terdiri dari 14 (empat belas) program dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4). Program Pemberdayaan Pemerintahan kecamatan dan Kelurahan
- 5). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 6). Program Kerja sama informasi dengan Media Massa
- 7). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 8). Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- 9). Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan
- 10). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 11). Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah
- 12). Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa
- 13). Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 14). Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial:

Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
PENCAPAIAN RENSTRA S/D 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2016	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
20 03	Urusan Wajib									
20 03	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan									
	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG									
20 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya tagihan telepon, fax, air dan listrik kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kantor yang bersih	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	11 Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya barang cetakan dan	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk kebutuhan tamu pemko	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terperuhinya biaya perjalanan dinas rakor dan rakon	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor pegawai harian	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
20	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
			06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit PC	1 unit PC	2 Unit PC, 1 Paket Alat Studio,	2 Unit PC, 1 Paket Alat Studio,	100%	2 Unit PC, 1 Paket Alat Studio,			
			20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah	Terpeliharanya rumah jabatan	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			83	Pensertifikatan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	Tersertifikasinya Tanah Milik Pemerintah	2 lokasi	2 lokasi	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%	
20	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian waktu melaksanakan tugas	108 stel	108 stel	18 stel	18 stel	100%	12 stel	12 stel	100%	
20	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
			03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur di lingkungan Setdako	41 orang	41 orang	17 orang	17 orang	100%	10 orang	10 orang	100%	
20	03	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
			02	Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/LN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			08	Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Tersedianya Pidato dan lancarnya kegiatan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	

		10	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
		12	Peringatan HUT Kota Padang Panjang Ke 227	Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kota Padang panjang ke 227	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		13	Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolalan	Terselenggaranya kegiatan keprotokolalan di Pemko Padang Panjang	-	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%
		15	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang Panjang	Terlaksananya koordinasi dengan unsur pimpinan daerah								
		00	Pelatihan SDM dalam Bidang Protokoler dan MC	Terlaksananya Pelatihan Protokoler dan MC di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	40 org	40 org	40 org	40 org	100%			
		16	Pelaksanaan Kegiatan APEKSI Tahun 2018	Terikutinya Munas APEKSI dan Muskod APEKSI								
20	03	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
		12	Penyelesaian Masalah Hukum Pemda	Terselesaikannya permasalahan hukum Pemerintahan Daerah	3 kasus	4 kasus	4 kasus	6 kasus	150%	4 kasus	4 kasus	100%
		16	Pengharmonisasian, Pembuatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	terlaksananya klinik hukum, pendampingan Hukum, advokasi permasalahan hukum pemda	13 Perda, 26 Perwako	13 Perda, 26 Perwako	8,Perda, 15 Perwako	11,Perda, 50 Perwako	137,5%, 333%	8,Perda, 15 Perwako	8,Perda, 15 Perwako	100%
		18	Pembuatan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pengelolaan Website JDih	Perubahan peraturan Kota Padang Panjang melalui buku lembaran Daerah dan Web JDih	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		22	Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat	Terfasilitasinya penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat yang membutuhkan	2 kasus	-	-	-	-	2 kasus	2 kasus	100%
20	03	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru									
		04	Penataan dan Penetapan Batas Antar Kelurahan Kota Padang Panjang	Terdapatnya batas wilayah yang jelas dan pasti untuk kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	100%	-	-	-
		05	Fasilitas pengalihan urusan Pemerintahan konkuren	terlaksananya serah terima P3D	-	-	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
		06	Pengelasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Terbertuknya Koordinat titik Batas antar Wilayah	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
20	03	30	Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan									
		01	Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	Terlaksananya penilaian terhadap Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah Berprestasi	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%

20	03	31	Program Penataan Kolombagaan dan Penataan Kotatatalaksanaan									
			04 Fasilitas Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terlaksananya Fasilitas pencapaian SPM	1 laporan	1 laporan	15 buku	15 buku	100%	6 bidang	6 bidang	100%
			05 Birek Evaluasi Jabatan	Meningkatnya sistem manajemen Aparatur	60 orang	60 orang	-	-	-	60 orang	60 orang	100%
			06 Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	-	-	-	-	1200 Jabatan	1200 Jabatan	100%
			07 Monitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	850 jabatan	850 jabatan	-	-	-	24 OPD	24 OPD	100%
			08 Revisi Perwako Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.	Terlaksananya Revisi Perwako Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.	-	-	22 buku	22 buku	100%	1 kali	1 kali	100%
20	03	48	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
			01 Pembinaan SOP	Terlaksananya Pembinaan SOP yang telah disusun SKPD	-	-	5 SKPD	5 SKPD	100%	24 OPD	24 OPD	100%
			02 Pembinaan Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang	-	-	8 Laporan	8 Laporan	100%	24 OPD	24 OPD	100%
			03 Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	8 SKPD	8 SKPD	15 Buku	15 Buku	100%	24 OPD	24 OPD	100%
20	03	39	Program Peningkatan Kapasitas Kolombagaan Ekonomi Daerah									
			01 Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Pengendalian Laju inflasi di Kota Padang Panjang	8 kali	8 kali	1 tahun	1 tahun	100	1 dokumen	1 dokumen	100%
20	03		Program Fasilitas Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									
			Koordinasi kerjasama daerah dalam pengembangan ekonomi daerah	terlaksananya rapat kerja sama dan koordinasi dalam pengembangan ekonomi daerah	8 kali	8 kali	-	-	-	-	-	-
			02 Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Perkembangan Usaha Bidang SDA & LH	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	4 kali	4 kali	100%

20	03	33	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah									
		11	Pengkoordinasian dan Pengendalian Penyaluran RASKIN	Tertindakannya Penyaluran RASKIN di Kota Padang Panjang	16 keturahan	16 keturahan	16 keturahan	16 keturahan	100%	16 keturahan	16 keturahan	100%
		14	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Tertindakannya pembinaa, Monitoring dan evaluasi perkembangan KPRI	26 KPRI	26 KPRI	26 KPRI	26 KPRI	100%	26 KPRI	26 KPRI	100%
		15	Fasilitasi dan Pembinaan BUMD	Tertindakannya Fasilitasi dan Pembinaan BUMD di Kota Padang Panjang	-	-	100%	100%	100%	1 BUMD	1 BUMD	100%
		16	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	Tertindakannya kajian penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
20	03	38	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah									
		01	Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Padang Panjang	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100%	11 bulan	11 bulan	100%
		02	Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tertindakannya bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		03	Operasional Maintenance LPSE	Tertindakannya proses registrasi, verifikasi, pelepasan/seleksi secara elektronik, Tersedianya peralatan/perangkat infrastruktur LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Pembinaan Jasa Konstruksi	Tersedianya laporan pelaksanaan Jasa Konstruksi di OPD Kota Padang Panjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tertindakannya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	100%	-	-	-
20	03	39	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah									
		01	Penyusunan LKIP Kota Padang Panjang	Buku laporan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017	27 SKPD	27 SKPD	45 buku	45 buku	100%	45 buku	45 buku	100%
		02	Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	Tertindakannya evaluasi kinerja SKPD	27 SKPD, 12 kali rapat	27 SKPD, 12 kali rapat	45 buku, 12 kali rapat	45 buku, 12 kali rapat	100%	12 kali	12 kali	100%

			14	Perencanaan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Buku Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2016 dan Buku Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan	120 buku	120 buku	120 buku	120 buku	100%	90 buku	90 buku	100%
20	03	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat									
			16	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya pembinaan UKS se Kota Padang Panjang	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	100%	4 sekolah	4 sekolah	100%
20	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
			12	Penyusunan Buku LKPJ Wako Tahun 2016	Tersusunnya buku LKPJ Wako Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			33	Perencanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2016	Tersusunnya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			45	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan		11 bulan	11 bulan	100%
20	03	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
			02	Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	Terlaksananya pesantren Ramadhan	64	64	-	-	-	64	64	100%
			05	Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPO/TPSQ	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi Guru TPO/TPSQ	170 org	185 org	185 org guru TPO	185 org guru TPO	100%	200 org guru TPO	200 org guru TPO	100%
			08	Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Lancarnya kegiatan Tim Ramadhan		38 mesjid	38 mesjid	38 mesjid	100%	12 mesjid	12 mesjid	100%
			09	Peningkatan Kesejahteraan Guru TPO/TPSQ, Imam Mesjid dan Gharin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan bagi Guru TPO/TPSQ, Imam Mesjid, Gharin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang	185 Guru TPO, 37 Khatibcadangan, 37 Imam Mesjid, 63 Garin Musholla	185 Guru TPO, 37 Khatibcadangan, 37 Imam Mesjid, 63 Garin Musholla	177 Guru TPO, 38 Khatibcadangan, 38 Imam Mesjid, 64 Garin Musholla	177 Guru TPO, 38 Khatibcadangan, 38 Imam Mesjid, 64 Garin Musholla	100%	204 Guru TPO, 38 Khatibcadangan, 38 Imam Mesjid, 38 Garin Mesjid, 64 Garin Musholla	204 Guru TPO, 38 Khatibcadangan, 38 Imam Mesjid, 38 Garin Mesjid, 64 Garin Musholla	100%
			10	Fasilitas Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Lancarnya pelaksanaan keberangkatan dan penjemputan haji Kota Padang Panjang	1 keg	1 keg	1 keg		100%	1 keg	1 keg	100%
			14	Muzakarah Ulama Kota	Terlaksananya Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang	14 materi	14 materi	3 materi	3 materi	100%	4 Materi	4 Materi	100%
			22	Pelaksanaan MTQ Kota Padang Panjang	Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	-	-

		23	Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	1 keg	1 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	100%
		24	Persiapan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	tersedianya pelaksanaan persiapan mengikuti MTQ Propinsi Sumbar	1 keg	1 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	100%
		25	Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam	Terlaksananya peringatan Hari-hari Besar Islam	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	100%	8 HBI	8 HBI	100%
			Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Terlaksananya Pelatihan dan lomba penyelenggaraan jenazah	90 org	90 org	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga BP4	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga BP4	-	-	-	-	-	-	-	-
		30	Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang	-	-	6 kali	6 kali	100%	14 kali	14 kali	100%
		32	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Islamic Center	Kesepahaman Pemda dengan Stakeholders tentang Islamic center dan Pembentukan kelembagaan Islamic center	-	-	-	-	-	1 keg	1 keg	100%
		33	Monev Efektivitas Bantuan Hibah	Terlaksananya Monev, verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah	-	-	-	-	-	11 bulan	11 bulan	100%
		34	Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majelis Taklim Bulanan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majelis Taklim Bulanan se kota Padang Panjang	36 Masjid	36 Masjid	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
		35	Penggiat Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Penilaian Jemaah tergiat masjid se kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	36 Masjid	36 Masjid	100%
20	03	18	Program Korjasama Informasi dengan Media Massa									
		01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan pembangunan Kota Padang Panjang bagi masyarakat	57 Media cetak,5 portal,2 stasiun televisi	57 Media cetak,5 portal,2 stasiun televisi	35 Media cetak,8 portal,3 stasiun televisi	49 Media cetak,8 portal,2 stasiun televisi	102,2	35 Media cetak, 3 media elektronik	35 Media cetak, 3 media elektronik	100%
		03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Tersosialisasikannya Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang di Tahun 2017 mempunyai 10 (sepuluh) sasaran yang merupakan sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Semua sasaran tersebut didukung dengan program/kegiatan pendukungnya yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017. Secara umum semua sasaran yang sudah ditargetkan tersebut telah berhasil diwujudkan.

Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran $\geq 100\%$ "**Memuaskan**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya "**Sangat Baik**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya "**Baik**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya "**Cukup**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya "**Kurang**"

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran stratejik dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabul 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-8/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (Tahun n-2)	Tahun 2017 (Tahun n1)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	pengadaan tanah untuk pembangunan			-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan			-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penataan Batas kelurahan di Kota Padang Panjang			8 Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Jumlah sekolah sehat yang dibina			TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 1	
				SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 1	
				SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	
				SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	
				(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	
5	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam			8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	
6	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi			5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	
7	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ			3 Milyar	3,Milyar	3,3,Milyar	3,3,Milyar	Rp.3.792 Milyar	3,3,Milyar	3,3,Milyar	3,3,Milyar	
8	Jumlah Perda yang ditetapkan			8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	11 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	
9	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan			15Perwako	15Perwako	15Perwako	15Perwako	50 Perwako	15Perwako	15Perwako	15Perwako	
10	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
11	Penyuluhan Hukum			-	-	4 kali kegiatan	2 kali kegiatan	-	-	-	-	
12	Laporan RANHAM			-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	
13	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ dan LPPD			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
14	% SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

15	Nilai IKM			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Berangus Baik	Baik
16	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja			75%	75%	75%	100%	62,96%	54,25%	75%	100%
17	Tertindakannya koordinasi dan monov penyusunan RASKIN			16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan
18	Tertindakannya kajian perusahaan			2 kajian	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 kajian	-	1 Dokumen	1 Dokumen
19	Tertindakannya koordinasi pengendalian inflasi daerah			2 raker dan 1 sosialisasi	3 Monev	3 kali (20)	3 monev	2 raker dan 1 sosialisasi	3 Monev	3 kali (20)	3 monev
20	Tertindakannya evaluasi kegiatan pembangunan			11 bulan	11 bulan	12 kali rapat	12 kali rapat	11 bulan	11 bulan	12 kali rapat	12 kali rapat
21	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan			80%	80%	78,74%	100%	98,78	97,82 %	100%	100%
22	Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah			90 orang	90 orang	90 orang	120 orang	90 orang	90 orang	90 orang	120 orang
23	Meningkatnya persentase regulasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan PPK dalam mengoperasikan LPSE			95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Tertindakannya pendidkian/ sosialisasi LPSE, SRUP dan monov online			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Penyebarnya Informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa			- 35 Media cetak	35 Media Cetak	-	-	- 57 Media cetak	49 Media Cetak	-	-
				- 8 portal	8 portal	-	-	- 5 portal	8 portal	-	-
				- 3 stasiun televisi	3 stasiun televisi	-	-	- 2 stasiun televisi	2 stasiun televisi	-	-
				- 2 radio	2 radio	-	-	- 2 radio	2 radio	-	-
27	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%)			- 27 SKPD	27 SKPD	-	-	- 27 SKPD	27 SKPD	-	-
				- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-	-	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-	-
				- 15 UPTD	15 UPTD	-	-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	-
				- 10 Informasi berkala	10 Informasi berkala	-	-	- 10 Informasi berkala	10 Informasi berkala	-	-
28	Ditaskannya Daftar Informasi Publik (%)			- 10 Informasi setiap saat	10 Informasi setiap saat	-	-	- 10 Informasi setiap saat	10 Informasi setiap saat	-	-
				- 2 Informasi serta merta	2 Informasi serta merta	-	-	- 2 Informasi serta merta	2 Informasi serta merta	-	-
				- 120 Kegiatan	100 Kegiatan	-	-	- 411 Kegiatan	180 Kegiatan	-	-
29	Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			-	-	35 Media Cetak	35 Media Cetak	-	-	35 Media Cetak	35 Media Cetak
				-	-	6 Media Online	6 Media Online	-	-	6 Media Online	6 Media Online
				-	-	3 media elektronik	3 media elektronik	-	-	3 media elektronik	3 media elektronik
30	Menghimpun dan Mendokumentasikan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa			-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen
				-	-	-	-	-	-	-	-
31	Tersusunnya Pidato kepala Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tertindakannya kegiatan Pemerintahan			-	-	12 kali	12 kali	-	-	12 kali	12 kali

	Pemerintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa			-	-	6 Media Online	6 Media Online	-	-	6 Media Online	6 Media Online	
				-	-	3 media elektronik	3 media elektronik	-	-	3 media elektronik	3 media elektronik	
31	Tersusunnya Pidato kepala Daerah			-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	
32	Tertaksannya kegiatan Pemerintahan			-	-	12 kali	12 kali	-	-	12 kali	12 kali	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Perwako Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

2. Asisten.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
7. Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.

Bagian Hukum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan,

Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

1. Dinas Pangan dan Pertanian;
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pariwisata;
6. Dinas PU dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
dan
8. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Bagian Perekonomian dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank

Bagian Perekonomian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan;

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengadaan barang jasa dan pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat DPRD;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

c.2 Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan;
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga

c.3 Bagian Protokoler

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler; dan
- 2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang sehingga kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang maka bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan, mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintahan daerah bidang urusan OTODA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian diarahkan dalam rangka Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN, Menyusun dan menerapkan SPM, Membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembinaan kesadaran hukum.

Selanjutnya Sekretariat Daerah Kota juga diarahkan dalam rangka Melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan, Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW, serta Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu dijelaskan yang menjadi Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (65)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	BB (65)
				Nilai LKPPD	Sangat Tinggi
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang berkualitas dan Melayani	Indek Kepuasan Masyarakat	79 (baik)	Meningkatnya Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal	86.33
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga keagamaan	56,58	- Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	56,58
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian	77,50	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	85
			Meningkatnya pencapaian pembangunan	Persentase pencapaian kegiatan	75

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			daerah	Pembangunan	

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan di atas maka dilaksanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2018 sesuai dengan tupoksi dari Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

Pagu Anggaran

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
20	03			Urusan Wajib								
20	03			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian								
				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG			24,059,470,500	-			26,358,837,250	
0	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puu atas pelayanan administrasi perkantoran		80 (%)	5.257.000.400 -				5.553.622.000
0	00	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/di operasionalkan	Padang Panjang	80 (Unit)	1.740.810.400	APBD	Bag. Umum	80 (Unit)	1.832.432.000

			04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	Padang Panjang	2 (Unit)	358.675.000	APBD	Bag. Umum	100%	358.675.000
			07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	Padang Panjang	11.407 (Ok)	536.200.000	APBD	Bag. Umum	11.407 (Ok)	536.200.000
			08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Padang Panjang	1400 (Orang/K ali)	1.800.000.000	APBD	Bag. Umum	1400 (Orang/K ali)	2.000.000.000
			09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah tenaga administrasi /teknis perkantoran yang dipekerjakan	Padang Panjang	58 (Orang)	325.115.000	APBD	Bag. Umum	100%	325.115.000
			18	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	Padang Panjang	3 (Jenis)	127.200.000	APBD	Bag. Umum	3 (Jenis)	127.200.000
					Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		10 (Jenis)				10 (Jenis)	
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		28 (Jenis)				28 (Jenis)	
			19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	Padang Panjang	22 (Rekening)	369.000.000	APBD	Bag. Umum	22 (Rekening)	374.000.000
					Jumlah jenis komponen		9 (Jenis)				9 (Jenis)	

					listrik dan penerangan kantor yang tersedia							
0	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90 (%)	4.447.080.000 -			90 (%)	2.611.642.000
			02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Padang Panjang	657 (Unit)	1.240.830.000	APBD	Bag. Umum	500 (Unit)	851.954.500
			06	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Padang Panjang	1 (Unit)	1.000.000.000	APBD	Bag. Umum	1 (Unit)	
			14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Padang Panjang	4 (Unit)	70.000.000	APBD	Bag. Umum	4 (Unit)	80.500.000
			24	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	Padang Panjang	85 (Unit)	500.000.000	APBD	Bag. Umum	85 (Unit)	500.000.000
			25	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota yang direhab	Padang Panjang	2 (Unit)	500.000.000	APBD	Bag. Umum	2 (Unit)	
			3 2	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Padang Panjang	1 (Gedung)	850.000.000	APBD	Bag. Umum	1 (Gedung)	850.000.000
					Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang	Padang Panjang	5 (Jenis)				5 (Jenis)	

					dipelihara							
			34	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Padang Panjang	2 (Unit)	286.250.000	APBD	Bag. Umum	2 (Unit)	329.187.500
					Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Padang Panjang	15 (Unit)		APBD	Bag. Umum		
3	07	15		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	100 (%)	3.221.550.000	APBD		100 (%)	3.417.627.500
			16	Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Padang Panjang	1 (Tahun)	221.550.000	APBD	Bag. Umum	1 (Tahun)	232.627.500
			18	Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Padang Panjang	7 (Jenis)	3.000.000.000	APBD	Bag. Umum	7 (Jenis)	3.185.000.000
3	07	18		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	JUMLAH produk hukum yang dihasilkan yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	Padang Panjang	100 (%)	761.500.000	APBD	Bag. Hukum	100 (%)	751.500.000

			01	Penyelesaian Masalah Hukum Pemda	jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah dan Masyarakat yang difasilitasi, serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan			460.000.000	APBD	Bag Hukum	1 (Laporan)	450.000.000
			02	Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dihasilkan		1 (Laporan)	130.000.000	APBD	Bag Hukum	8 Perda dan 20 Perwako (Dokumen)	130.000.000
			03	Kegiatan Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah	Jumlah buku lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan serta Jumlah Produk Hukum yang diupload dalam Web JDIIH	Padang Panjang	450 buku lembaran Daerah, dan 450 buku berita daerah (Dokumen)	100.000.000	APBD	Bag Hukum	450 buku lembaran Daerah, dan 450 buku berita daerah (Dokumen)	100.000.000
			06	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	Jumlah laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang yang disusun		1 (Laporan)	11.500.000 -	APBD	Bag Hukum	1 (Laporan)	11.500.000
			08	Kegiatan Sosialisasi Peraturan	Jumlah peserta sosialisasi		200 (Orang)	60.000.000	APBD	Bag Hukum	200 (Orang)	60.000.000

				Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan							
3	07	19		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan		2 (Kecamatan)	66.700.000			2 (Kecamatan)	66.700.000
			01	Kegiatan Penegasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Pembentukan Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun	Padang Panjang	1 (Dokumen)	34.500.000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 (Dokumen)	34.500.000
			02	Kegiatan Penataan Rupa Bumi dan Unsur Alami	jumlah objek rupa bumi yang telah dipetakan		1 (Dokumen)	32.200.000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 (Dokumen)	32.200.000
3	07	20		Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan		100%	162.800.000			100%	32.800.000
			03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 (Kali)	12.800.000	APBD	Bag. Organisasi	1 (Kali)	12.800.000
			09	Kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun		1 (Dokumen)	50.000.000 -	APBD	Bag. Organisasi	1 (Dokumen)	
			10	Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa		17 Kelas Jabatan dan 60	50.000.000	APBD	Bag. Organisasi	0 kajian	

				dan Kelas Jabatan	Jabatan dan Kelas Jabatan							
			12	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Peta Proses Bisnis		1 (Dokumen)	50.000.000 -	APBD	Bag. Organisasi	1 (Dokumen)	
3	07	21		Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		95 (%)	1.393.142.000			95 (%)	1.402.988.300
			04	Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan	Padang Panjang	12 (Laporan)	70,000,000	APBD	Bag.PBJ dan PP	-	-
			05	Kegiatan Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)		110 (Orang)	80.000.000	APBD	Bag.PBJ dan PP		80.000.000
			06	Kegiatan Operasional Maintenance LPSE	Jumlah Infrastruktur dan maintenance LPSE yang dikelola		1 (Tahun)	897.000.000	APBD	Bag.PBJ dan PP	1 (Tahun)	897.000.000
			07	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta Bimbingan Teknis		80 (Orang)	57.002.000	APBD	Bag.PBJ dan PP	80 (Orang)	61.052.300

			Pemerintah	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK							
		10	Kegiatan Fasilitas Kerjasama dengan LKPP	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan		2 (Kali)	38.640.000	APBD	Bag.PBJ dan PP	2 (Kali)	44.436.000
		11	Kegiatan Koordinasi Aksi Anti KKN dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Menambah kesadaran Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa		80 (Orang)	170.000.000	APBD	Bag.PBJ dan PP	80 (Orang)	170.000.000
		12	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Berstandar ISO 9001	Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan		1 (Kali)	80.500.000	APBD	Bag.PBJ dan PP	1 (Kali)	80.500.000
3	07	27	Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		100 (%)	300.000.000			100 (%)	235.000.000
		01	Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah terlaksananya Survei standar biaya Hidup	Padang Panjang	1 (Kali)	140.000.000 -	APBD	Bag. Perekonomian	1 (Kali)	50.000.000
		03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	Padang Panjang	26 (Koperasi)	40.000.000	APBD	Bag. Perekonomian	26 (Koperasi)	40.000.000
		04	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup	Padang Panjang	4 (Kali)	47.000.000	APBD	Bag. Perekonomian	4 (Kali)	60.000.000

			05	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan	Padang Panjang	4 (Kali)	43.000.000	APBD	Bag. Perekonomian	4 (Kali)	50.000.000
			08	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Umum Pangan, Pertanian dan UMKM	Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan umum Pangan, Pertanian dan UMKM	Padang Panjang	4 (Kali)	30.000.000 -	APBD	Bag. Perekonomian	4 (Kali)	35.000.000
3	07	32		Program Protokoler dan Dokumentasi	Persentase pelayanan keprotokolasian WAKO/WAWAKO		100 (%)	1.793.400.000			100 (%)	1.393.400.000
			01	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi	Padang Panjang	1 (Tahun)	65.000.000	APBD	Bag. Protokol	1 (Tahun)	65.000.000
			02	Kegiatan Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun	Padang Panjang	84 (Dokumen)	65.220.000	APBD	Bag. Protokol	84 (Dokumen)	65.220.000

			03	Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 (Tahun)	361.100.000	APBD	Bag. Protokoler	1 (Tahun)	361.100.000
			05	Kegiatan Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota	Dokumentasi dan pengolahan informasi kegiatan Wako/Wawako	Padang Panjang	1 (Dokumen)	302.080.000 -	APBD	Bag. Protokoler	1 (Dokumen)	302.080.000 -
			06	Operasional Kantor Penghubung	Tersedianya sarana dan prasarana kantor penghubung	Padang Panjang	1 (Tahun)	1.000.000.000	APBD	Bag. Protokoler	1 (Tahun)	1.000.000.000
3	07	33		Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip		65 (Baik)	144.000.000			70,1 (Baik)	144.000.000
			04	Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen LKjIP Kota Padang Panjang	Padang Panjang	1 dokumen	144.000.000	APBD	Bag. Organisasi	1 dokumen	144.000.000
					Jumlah dokumen Laporan evaluasi Kinerja yang dihasilkan	Padang Panjang	12 (Dokumen)		APBD	Bag. Org	12 (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang dihasilkan	Padang Panjang	2 (Dokumen)		APBD	Bag. Org	2 (Dokumen)	

3	07	34		Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik		100 (%)	404.947.500			100 (%)	458.189.625
			02	Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan public	Padang Panjang	24 (OPD)	50.000.000	APBD	Bag. Org	24 (OPD)	50.000.000
			03	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Padang Panjang	24 (Unit)	354.947.500	APBD	Bag. Org	24 (Unit)	44,000,000
3	07	36		Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	Persentase Peningkatan aktifitas Keagamaan		80 (%)	8.668.730.000			80 (%)	8.211.539.500
			01	Kegiatan SMART SURAU	Jumlah Surau Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Smart Surau	Padang Panjang	13 (Masjid)	365.000.000	APBD	Bag. Kesra	13 (Masjid)	375.000.000
			02	Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina	Padang Panjang	4 (Sekolah)	170.000.000	APBD	Bag. Kesra	4 (Sekolah)	170.000.000
			03	Kegiatan Muzakarah Ulama Kota	Jumlah Rumusan yang dihasilkan pada Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang		4 (Materi)	125.000.000	APBD	Bag. Kesra	4 (Materi)	125.000.000

			04	Kegiatan Fasilitas Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah peringatan Hari-hari Besar Islam yang diselenggarakan		1 (Tahun)	170.000.000 -	APBD	Bag. Kesra	1 (Tahun)	170.000.000
			05	Kegiatan Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	Jumlah guru TPQ/TPSQ yang bersertifikasi, Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama, Jumlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai	Padang Panjang	60, 35, 8 (Buah)	130.000.000	APBD	Bag. Kesra	60, 35, 8 (Buah)	130.000.000
			06	Kegiatan Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah Masjid Yang Dikunjungi	Padang Panjang	12 (Masjid)	218.730.000	APBD	Bag. Kesra	12 (Masjid)	251.539.500
			07	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Gharin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang	Jumlah Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid, Khatib Cadangan, Gharin/Petugas Kebersihan, Mesjid/Mushalla Kota Padang Panjang yang disediakan	Padang Panjang	250 orang guru TPQ/TPSQ, 40 Imam Mesjid, 40 Garin Mesjid, 75 Garin Mushala, 40 Khatib Cadangan (Orang)	5.100.000.000	APBD	Bag. Kesra	250 orang guru TPQ/TPSQ, 40 Imam Mesjid, 40 Garin Mesjid, 75 Garin Mushala, 40 Khatib Cadangan (Orang)	5.100.000.000
			08	Kegiatan Fasilitas Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan	Padang Panjang	225 (Orang)	200.000.000	APBD	Bag. Kesra	225 (Orang)	200.000.000

					penjemputan nya							
			10	Kegiatan Pembinaan Remaja Masjid	Jumlah mesjid yang menyelengga rakan kegiatan Remaja Mesjid dan pejuang subuh, Subuh Mubarakah, Magrib mengaji	Padang Panjang	38 kelompok remaja Masjid dan 10 Masjid Pejuang Subuh (Kelompo k)	290.000.000	APBD	Bag. Kesra	38 kelompok remaja Masjid dan 10 Masjid Pejuang Subuh (Kelompo k)	290.000.000
			1 1	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majelis Taklim Bulanan	Jumlah Kegiatan Wirid Pengajian Majlis Taklim Bulanan yang difasilitasi		34 (Kelompo k)	70.000.000	APBD	Bag. Kesra	34 (Kelompo k)	70.000.000
			12	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Islamic Center	Operasional Islamic Centre yang disiapkan		1 (Tahun)	600.000.000	APBD	Bag. Kesra	1 (Tahun)	600.000.000
			13	Kegiatan Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran	Jumlah kampung Tahfiz Qur'an yang terbentuk	Padang Panjang	2 (Kampun g)	130.000.000	APBD	Bag. Kesra	2 (Kampun g)	130.000.000
			14	Kegiatan Subuh Mubarakah	Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan	Padang Panjang	11 (Kali)	200.000.000	APBD	Bag. Kesra	11 (Kali)	200.000.000
			15	Kegiatan Peringatan Hari Santri	Jumlah Event Peringatan Hari Santri Tk Kota dan Nasional di Padang	Padang Panjang	1 (Kali)	400.000.000	APBD	Bag. Kesra	1 (Kali)	400.000.000

					Panjang							
			13	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ Tk Kota	Padang Panjang	600 (Orang)	500.000.000	APBD	Bag. Kesra	600 (Orang)	
3	07	37		Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD,LKPJ		Sangat Baik, Diterima (Laporan)	408.235.500			Sangat Baik, Diterima (Laporan)	453.563.325
			01	Kegiatan Penyusunan Buku LKPJ Wako	Tersusunnya buku LKPJ Wako	Padang Panjang	1 (Dokumen)	27.800.000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 (Dokumen)	27.800.000
			02	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun	Padang Panjang	1 (Dokumen)	63.250.000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 (Dokumen)	63.250.000
			06	Penilaian Kompetensi Camat, Lurah, Sekretaris Lurah dan RT	Jumlah camat & Lurah yang dinilai Kompetensinya	Padang Panjang	18 (Orang)	15.000.000	APBD	Bag. Pemerintahan	18 (Orang)	15.000.000
			07	Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari jadi Kota padang Panjang yang dilaksanakan , pemberian penghargaan bagi tokoh Masyarakat	Padang Panjang	2 (Kegiatan)	113.068.000	APBD	Bag. Pemerintahan	2 (Kegiatan)	130.028.200

			08	Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas Apeksi dan Muskod yang di Ikuti	Padang Panjang	1 (Tahun)	115.000.000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 (Tahun)	132.250.000
			09	Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan dan penghargaan daerah	Padang Panjang	15 (Orang)	74.117.500	APBD	Bag. Pemerintahan	15 (Orang)	85.235.125

Prioritas 2

				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG				108.000.000				200.000.000
0	00	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek		1 (Tahun)	108.000.000			1 (Tahun)	200.000.000
			05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek	Padang Panjang	25 (Orang/K ali)	108.000.000	APBD	Bag. Umum	25 (Orang/K ali)	200.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang yang juga merupakan acuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Semua masukan dan pemecahan masalah diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kekurangan yang ada sekarang serta perencanaan yang akan datang. Dengan demikian diharapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, merupakan kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diwujudkan.

Padang Panjang, Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**


SONNY BUDAYA PUTRA, AP. M.Si
NIP. 197503301995011001